
**PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DI KABUPATEN PULAU
MOROTAI: SEBUAH KONSEP ILMIAH UNTUK
MODEL INTEGRASI EKONOMI**

*(Fishery Industry Development in Morotai Island Regency: A Scientific
Concept for Integrated Economics Model)*

^{1*)} Achmad Zamroni, ¹⁾ Siti Hajar Suryawati, ¹⁾ Andrian Ramadhan,
¹⁾ Sonny Koeshendrajana

¹⁾ Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Komplek Bina Samudera Gedung BRSDMKP 1 Lt. 3-4,
Jalan Pasir 1 Ancol Timur, Jakarta 14430

^{*)} Korespondensi: roni_socio@yahoo.com

Diterima: 28 Januari 2019 / Disetujui: 23 April 2019

ABSTRAK

Pengembangan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai menghadapi tantangan besar dalam iklim investasi saat ini. Iklim investasi tersebut dipengaruhi oleh faktor sumberdaya perikanan, infrastruktur, pasar dan kelembagaan. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, Menganalisis konsep model industri perikanan, dan merumuskan strategi integrasi ekonomi. Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara dengan responden dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion* - FGD). Informasi primer tersebut dilengkapi dengan data-data sekunder yang diperoleh dari data statistik kabupaten, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah terkait. Data dianalisis menggunakan empat metoda, yaitu: analisis deskriptif; analisis *Strengthen, Weakness, Opportunity* dan *Threat* (SWOT); analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM); dan analisis MIC-MAC. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) telah berpengaruh positif terhadap pembangunan industri perikanan di Kabupaten Morotai. Ada 4 aspek pokok yang berpengaruh, yaitu: (1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP); (2) pengembangan ekonomi dan bisnis; (3) pengembangan masyarakat; dan (4) regulasi dan sinergi. Strategi integrasi ekonomi difokuskan pada implementasi model industri perikanan sebagai basis produksi dan ekspor ikan Tuna segar.

Kata kunci: industri perikanan, integrasi ekonomi, morotai, tuna segar

ABSTRACT

The development of the fisheries industry in Morotai Island District faces major challenges in investment climate recently. Those investment is influenced by fisheries resources, infrastructure, markets and institutions. This paper aims to describe the fishery industry in Morotai Island District, analyze the concept of the fishery industry model, and formulate a strategy for economic integration. Primary data was taken using a structured questionnaire through interviews with respondents and focused group discussions (FGD). The primary information is supplemented by secondary data obtained from district statistical data, research reports, and related scientific publications. Data were analyzed using four methods, namely: descriptive analysis; Analysis of Strengthen, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT); Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis; and MIC-MAC analysis. The results from the analysis show the integrated marine and fisheries center (SKPT) policy implementation has had a positive effect on the fisheries industry development in Morotai Island. There are four main influence aspects: (1) marine and fisheries resources (SDKP) management; (2) economic and business development; (3) community development; and (4) regulatory and synergies. The strategy of economic integration is focused on the implementation of the fisheries industry model as the production and export base for fresh tuna.

Keywords: *economic integration, fishery industry, fresh tuna, morotai*

PENDAHULUAN

Pembangunan industri perikanan dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa tujuan SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Fokus pengembangan SKPT ada empat hal, yaitu: peningkatan nilai tambah; peningkatan daya saing; modernisasi dan korporatisasi usaha; dan penguatan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan (KKP 2017). Lokasi pembangunan SKPT juga telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri (Kepmen) No 51 tahun 2016.

Salah satu lokasi SKPT adalah Kabupaten Pulau Morotai. Pada Kabupaten Pulau Morotai dilakukan pengembangan industrialisasi perikanan yang akan melibatkan banyak pelaku usaha untuk membangun industri perikanan (Adam 2012). Relasi antara sektor industri, pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar), institusi formal serta informal. Para aktor akan memilih hubungan sosial yang berdampak terhadap

perkembangan usahanya (Due *et al.* 1999). Pemecahan masalah dalam membangun industrialisasi perikanan di Morotai tidak hanya dalam pemanfaatan sumberdaya material, namun perlu memperhatikan aspek sumberdaya sosial atau modal sosial, yang diharapkan mampu menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Bagi masyarakat pesisir, industrialisasi memberikan harapan untuk dapat memanfaatkan peluang ekonomi lain terhadap keberadaan industri perikanan.

Konsep model integrasi ekonomi dalam rangka mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai dirumuskan melalui tiga aspek yaitu: 1) aspek pengembangan ekonomi dan bisnis, yang mencakup efisiensi rantai pasok, daya saing wilayah, dan kebutuhan pembiayaan usaha atau investasi; 2) aspek manajemen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang mencakup optimasi sosial ekonomi dari model pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) serta perhitungan skenario dampak sosial ekonomi terhadap keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP); dan 3) aspek pengembangan masyarakat yang mencakup pengembangan potensi sosio historis dan budaya masyarakat (etos, sistem nilai) untuk menjadi modal dasar keterlibatan aktif dalam pembangunan dan potensi ekonomi dalam nilai tambah pengembangan wisata bahari (BBRSEKP, 2017).

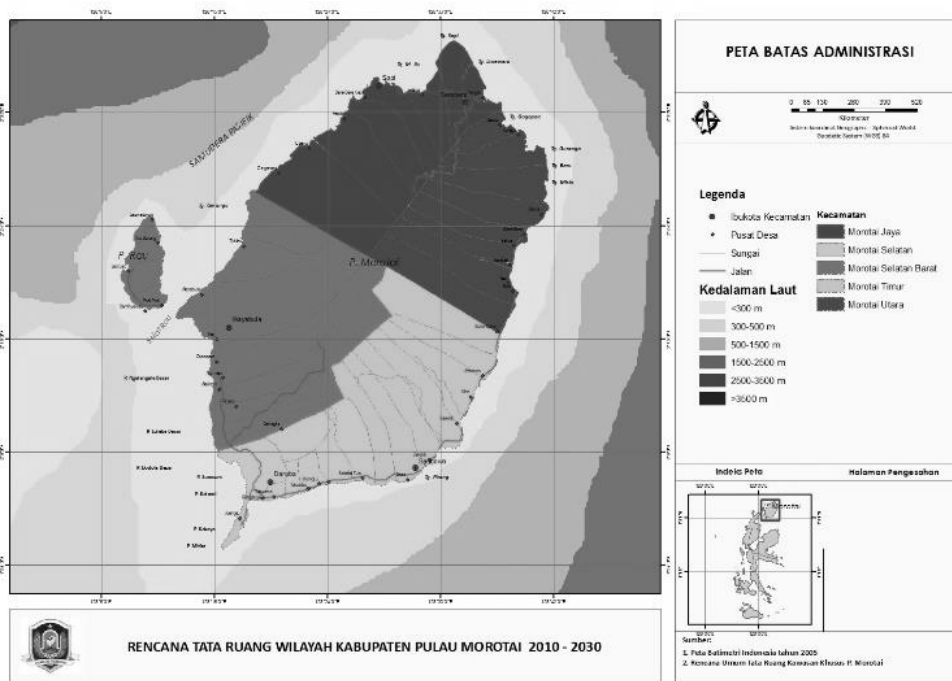
Namun, hasil penelaahan dokumen-dokumen dan temuan di lapangan, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan SKPT di Morotai, yaitu: tata niaga yang belum teridentifikasi, investasi, *destructive fishing* dan IUU, konflik akses pemanfaatan SDKP antar nelayan, rendahnya pengetahuan, belum ada penetapan kawasan konservasi perairan (KKP), belum optimalnya pengembangan pariwisata bahari, mata pencaharian utama masyarakat lokal lebih berorientasi pertanian, usaha perikanan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan (konsumsi), usaha perikanan didominasi nelayan andon (Bitung), terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait diversifikasi hasil pengolahan ikan, masih lemahnya sumberdaya nelayan dalam pengelolaan kapal diatas 5 GT (DJPRL 2016; DPRL 2017; Pemkab. Pulau Morotai 2015).

Oleh karena itu, secara spesifik makalah ini bertujuan untuk menggambarkan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, menganalisis konsep model industri perikanan, dan merumuskan strategi integrasi ekonomi. Secara operasional, model ini diharapkan dapat membantu merancang pola pengelolaan kawasan yang menjamin efektifitas pelaksanaan kebijakan perikanan, mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan, menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, memberi arah interaksi harmonis kelembagaan dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan selama Tahun 2017. Lokasi penelitian berada pada 4 dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, yaitu: Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Timur dan Morotai Utara. Dari 4 kecamatan, terdapat 29 desa yang dijadikan titik penelitian. Peta Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Pulau Morotai
 Sumber: Bappeda Kabupaten Pulau Morotai (2015)

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer (ekologi, sosial dan ekonomi) diperoleh secara langsung di lapangan pencatatan langsung, dan wawancara melalui kuesioner kepada responden seperti nelayan, pembudidaya, wisatawan, para penyedia jasa wisata, para pemangku adat, pemerintah daerah termasuk pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi. Wawancara mendalam pada informan kunci dan melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan.

Topik data primer yang dikumpulkan terkait dengan data pemanfaatan ruang, karakteristik pemanfaatan, kondisi eksiting peran dan fungsi para pemangku kepentingan, bentuk, tipe dan fungsi hubungan antar pemangku kepentingan, permasalahan atau kendala dalam menjalankan peran dan fungsi lembaga (Azwar, 2005). Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran literatur dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, laporan instansi terkait, dokumentasi, majalah, koran dan publikasi lainnya. Topik data sekunder yang dikumpulkan adalah: statistik perikanan, *masterplan* pembangunan kawasan morotai, karakteristik ekosistem pesisir, sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, aturan (peraturan pusat, daerah dan lokal terkait SKPT dan usaha perikanan), list program berbantuan. Data statistik Kabupaten Pulau Morotai mulai tahun 2012-2016, dan data-data lain yang mendukung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Metode Analisa Data

Metode Analisis MIC-MAC

Metode *Matrice d'Impacts Croisés-Multiplication Appliquee à un Classement* (MIC-MAC) digunakan untuk mendefinisikan batasan sistem dan menentukan parameter kunci melalui analisis struktural dari sistem yang dipelajari. MIC-MAC pada dasarnya adalah matriks struktural sebab akibat. Matriks ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar parameter pada sistem yang dikaji dan sekaligus merinci posisi parameter serta menyusunnya ke dalam bentuk hirarki parameter (Hubeis 1991). Analisis parameter sistem dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan klasifikasi langsung, hubungan antar parameter diperoleh secara langsung dari hasil identifikasi berdasarkan pendapat pakar (*expert survey*). Sedangkan berdasarkan klasifikasi tidak langsung, hubungan antar parameter diperoleh dari hasil operasi penggandaan matriks terhadap dirinya sendiri.

Matriks struktural MIC-MAC disusun dari unsur-unsur yang menggambarkan hubungan antar parameter sistem. Jika dari suatu sistem teridentifikasi n parameter, maka dapat dibentuk suatu matriks bujur sangkat $M1$ $n \times n$ yang terdiri dari n baris dan n lajur, dengan a_{ij} adalah unsur matriks pada baris ke- i dan lajur ke- j . Unsur matriks ini menunjukkan hubungan antar parameter sistem. Unsur a_{23} menunjukkan hubungan antara parameter 2 dengan parameter 3. Pada matriks bujur sangkar $M1$ $n \times n$ terdapat n^2 unsur yang berarti ada n^2 hubungan antar parameter sistem.

$$M1 \ n \times \ n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Penggandaan matriks bujur sangkar $M1$ $n \times n$ dengan dirinya sendiri menghasilkan matriks $M2$.

$$M2 \ n \times \ n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

atau

$$M2 \ n \times \ n = (M1 \ n \times \ n) \times (M1 \ n \times \ n)$$

Selanjutnya penggandaan matriks bujur sangkar $M2$ $n \times n$ dengan dirinya sendiri menghasilkan matriks $M3$.

$$M3 \ n \times \ n = (M2 \ n \times \ n) \times (M2 \ n \times \ n)$$

$$M3 \ n \times \ n = ((M1 \ n \times \ n) \times (M1 \ n \times \ n)) \times ((M1 \ n \times \ n) \times (M1 \ n \times \ n))$$

Seterusnya

$$M4 \ n \times \ n = (M3 \ n \times \ n) \times (M3 \ n \times \ n)$$

Atau

$$M_t \ n \times \ n = (M(t-1) \ n \times \ n) \times (M(t-1) \ n \times \ n)$$

Proses penggandaan matriks selesai jika tercapai kestabilan matriks yang ditunjukkan oleh konsistensi unsur-unsur matriks dengan posisi unsur-unsur matriks pada penggandaan ke-t sama dengan posisi pada penggandaan ke-(t-1). Pada saat kestabilan matriks dicapai dapat diidentifikasi pola hubungan antar parameter matriks berdasarkan klasifikasi tidak langsung. Identifikasi hubungan antar parameter secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan data kategorik dengan skala biner (0 dan 1) atau skala berjenjang (0 - 5). Data kategori 0 menunjukkan tidak ada hubungan, sedangkan kategori 1 pada skala biner menunjukkan ada hubungan. Adapun pada skala berjenjang, data kategori 1 sampai 5 menunjukkan intensitas hubungan (dari sangat lemah, 1 sampai sangat kuat, 5). Untuk unsur-unsur matriks a_{ij} yang memiliki indeks yang sama ($i = j$) yang terletak pada diagonal utama diberi nilai 1. Unsur-unsur ini menunjukkan hubungan antar parameter yang sama. Klasifikasi parameter dilakukan berdasarkan kategori motor (*driven power*) dan respons (*dependence*). Parameter x_k dikategorikan motor jika:

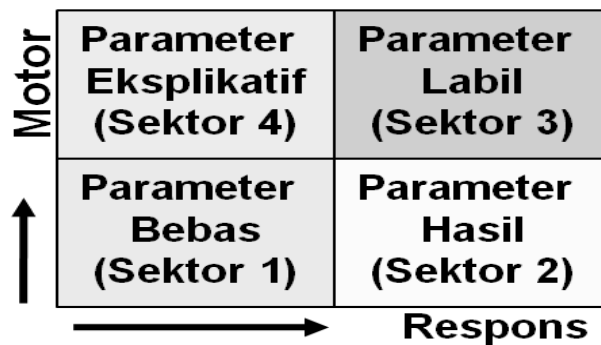
$$\sum akj > \sum \sum aij/n$$

dan dikategorikan respons jika:

$$\sum aik > \sum \sum aij/n$$

untuk $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$

Kategori motor-respons tersebut dapat digunakan untuk membangun Bagan Motor-Respons menurut ranking parameter berdasarkan derajat motor dan respons yang dimilikinya. Bagan ini menjelaskan kedudukan sejumlah parameter pada sistem yang dikaji (Hubeis 1991), seperti disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan motor – respons menurut metode MIC – MAC (Sumber: Hubeis, 1991)

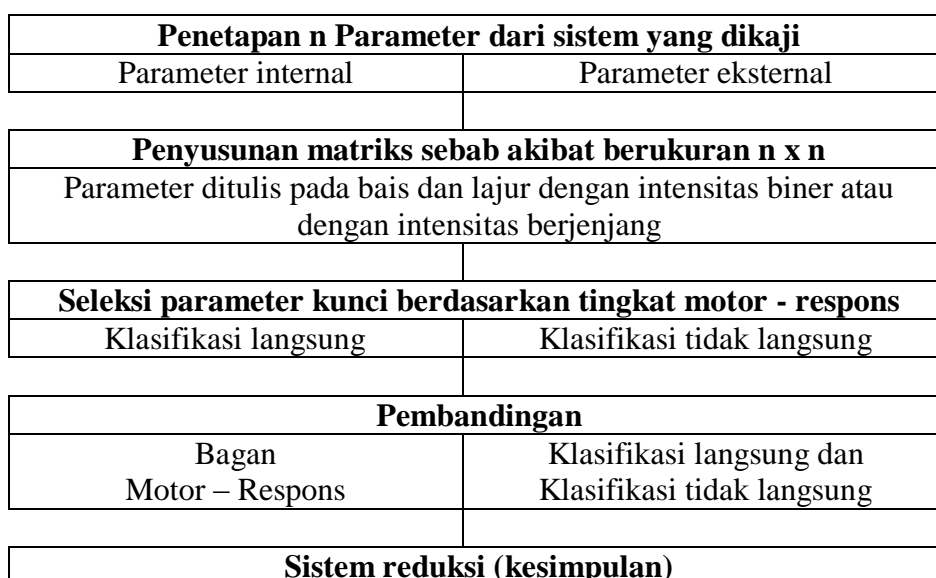
Parameter yang memiliki derajat kurang motor dan kurang respons dikelompokkan sebagai parameter bebas (Sektor 1). Parameter ini menyusun kecenderungan ketidakterkaitan atau memiliki hubungan yang lemah terhadap sistem. Adapun parameter yang kurang motor dan sangat respons dikelompokkan sebagai parameter hasil (Sektor 2). Parameter-parameter ini tidak dapat secara langsung menjelaskan pengaruhnya terhadap sistem, tetapi seringkali berperan sebagai pelaku utama di dalam sistem. Parameter ini seringkali dapat dijelaskan oleh parameter pada Sektor 3 dan parameter pada Sektor 4 (Hubeis, 1991).

Parameter yang sangat motor dan sangat respons dikelompokkan sebagai parameter labil (Sektor 3). Parameter-parameter ini merupakan suatu obyek yang

menarik, karena memberikan pengaruh ketidakstabilan terhadap sistem. Seluruh aktivitas parameter labil akan mempengaruhi parameter-parameter pada sektor lainnya dan sekaligus memberikan umpan balik terhadap parameter labil itu sendiri. Adapun parameter yang sangat motor dan kurang respons dikelompokkan sebagai parameter eksplikatif (Sektor 4). Parameter ini bersifat menerangkan dan tetap berada di dalam sistem. Parameter eksplikatif juga mempunyai kemungkinan untuk mengukur aktivitas langsung dari pelaku sistem sebagai suatu beda intensitas hubungan (Hubeis 1991).

Selanjutnya dengan menggunakan metode MIC-MAC, hirarki parameter dapat diklasifikasikan atas klasifikasi langsung dan tidak langsung. Klasifikasi langsung menggambarkan hubungan hirarki secara langsung antara suatu parameter terhadap parameter lainnya, tanpa memperhatikan pengaruh tidak langsung di antara parameter-parameter tersebut. Sedangkan klasifikasi tidak langsung menggambarkan hubungan hirarki yang terbentuk secara tidak langsung (MIC-MAC) yang didasarkan pada pengaruh lintas dan umpan balik (Hubeis, 1991) melalui perantaraan suatu parameter lainnya yang bersifat transitif. Menurut Eriyatno (1999), kemampuan metode MIC-MAC dalam analisis struktural untuk hubungan tidak langsung ini menjadikannya lebih populer dibandingkan dengan metode *Interpretative Structural Modelling* (ISM) yang memiliki kemampuan terbatas hanya pada analisis struktural untuk hubungan langsung.

Pembandingan hirarki parameter berdasarkan klasifikasi langsung dan tidak langsung memberikan kajian yang menarik tentang evolusi sistem. Pengkajian ini dapat menunjukkan kecenderungan pergeseran hirarki parameter karena pengaruh parameter lainnya. Menurut Hubeis (1991) sekitar 10 - 20% parameter akan mengalami pergeseran posisi atau mempunyai hirarki klasifikasi tidak langsung yang berbeda dari klasifikasi langsungnya. Tahapan analisis dengan metode MIC-MAC disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tahapan lengkap proses analisis dengan menggunakan metode MIC-MAC

Metode Analisis MACTOR

MACTOR (*Matrix of Alliance Conflict Tactic Operation and Responses*) merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Micher Godet pada tahun 1984. Analisis mactor dilakukan melalui pemetaan tiap pemangku kepentingan ke dalam matriks analisis pemangku kepentingan berdasarkan tingkat ketergantungan dan pengaruh. Metode ini terdiri dari tahapan berikut (Hubeis, 1991):

1. Menentukan aktor dan memahami strateginya
2. Menganalisis pengaruh antar aktor dan mengevaluasi keseimbangan *Matrix of Direct and Indirect Influences* (MDII)- nya.
3. Identifikasi taruhan strategis dan sasaran yang terkait dan posisikan masing-masing aktor sesuai dengan masing-masing tujuan (*The matrix of valued positions Actor X Objective - MAO*)
4. Konvergensi / divergensi tepat (posisi sederhana)
5. Merumuskan rekomendasi strategis yang koheren dan mengajukan pertanyaan kunci untuk masa depan.

Metode Analisis SWOT

Tahapan kerja penyusunan strategi integrasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut:

1. Penyusunan hirarki
 Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya dan setiap unsur kemudian diuraikan menjadi beberapa kriteria dari unsur yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi struktur hirarki.
2. Penilaian kriteria
 Kriteria dinilai melalui perbandingan berpasangan. Penentuan tingkat kepentingan (bobot) dari elemen keputusan, penilaian pendapat (*judgement*) dilakukan dengan menggunakan fungsi berpikir dan dikombinasi dengan intuisi, perasaan, penginderaan dan pengetahuan. Penilaian pendapat ini dilakukan dengan perbandingan berpasangan yaitu membandingkan setiap elemen dengan elemen lainnya pada setiap tingkatan kepentingan elemen dalam pendapat yang bersifat kualitatif. Untuk mengkuantifikasi pendapat tersebut, digunakan skala penilaian sehingga diperoleh nilai pendapat dalam bentuk angka (kuantitatif). Hasil penilaian disajikan dalam bentuk matriks *pairwise comparison*. Penggunaan untuk berbagai persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan (Tabel 1).

Tabel 1. Skala dasar ranking *Analysis Hierarchy Process* (AHP)

No	Nilai	Keterangan
1	1	Kedua elemen sama pentingnya
2	3	Elemen yang satu <u>sedikit lebih penting</u> dari elemen yang lain
3	5	Elemen yang satu <u>lebih penting</u> dari elemen yang lain
4	7	Elemen yang satu <u>jelas lebih penting</u> dari elemen yang lain
5	9	Elemen yang satu <u>mutlak lebih penting</u> dari elemen yang lain
6	2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

Sumber: Saaty (1991)

3. Penentuan prioritas

Berdasarkan matriks perbandingan berpasangan, kemudian dicari nilai *eigen valuenya* untuk mendapatkan prioritas lokal. Nilai-nilai perbandingan relatif tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan peringkat relatif dari keseluruhan kriteria. Baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan *judgement* yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.

4. Konsistensi logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. Jika penilaian tidak konsisten, maka proses harus diulang untuk memperoleh nilai yang lebih tepat. Analisis hirarki proses digunakan untuk mengetahui pendapat *stakeholders* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan integrasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai. Beberapa faktor yang disajikan dalam kuesioner merupakan hasil penggalian kuesioner pendahuluan yang diperkuat dengan referensi tertulis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Faktor-faktor yang terjaring dari pendapat responden pada kuesioner pendahuluan kemudian diranking berdasarkan jumlah/frekuensi faktor yang terbanyak dipilih oleh responden. Penggunaan teknik AHP dapat mengetahui kriteria yang paling berpengaruh dari masing-masing faktor yang ditentukan. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui pendapat responden terkait pengembangan integrasi ekonomi melalui SKPT di Kabupaten Pulau Morotai. Jawaban dari kuesioner tersebut diolah menggunakan program *Expert Choice*. Melalui pengolahan data dari kuesioner tersebut, maka dapat diketahui pendapat keseluruhan responden mengenai bobot dan prioritas kepentingan dari tiap faktor yang mempengaruhi pengembangan perkebunan integrasi ekonomi melalui SKPT di Kabupaten Pulau Morotai.

Pertimbangan yang digunakan dalam menyusun arahan pengembangan integrasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi perikanan melalui SKPT di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari kriteria berikut ini:

- a. potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
- b. nilai kontribusi
- c. nilai LQ
- d. nilai *farmer share*
- e. nilai investasi (R/C)
- f. nilai *multiflier effect*
- g. preferensi masyarakat perikanan terhadap SKPT.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka disusunlah arahan strategi prioritas pengembangan dengan ketentuan yang ditunjukkan pada Gambar 4. Menentukan strategi pengembangan integrasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi perikanan melalui pengembangan SKPT dengan menggunakan analisis AHP-SWOT. Analisis *Strenght Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini atau disebut dengan analisis situasi (Rangkuti, 1997).



Gambar 4 Proses pemilihan arahan prioritas pengembangan integrasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai

Data yang diperoleh dari responden diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi faktor-faktor strategis internal dan eksternal. Pembobotan atas kelompok faktor dan faktor strategis internal dan eksternal melalui metode perbandingan berpasangan. Pada pengembangan alternatif strategi digunakan matriks SWOT untuk membantu melakukan pencocokkan antar kekuatan dan peluang (strategi SO), kekuatan dan ancaman (strategi ST), peluang dan kelemahan (strategi WO) serta kelemahan dan ancaman (strategi WT). Setelah alternatif strategi dibuat maka untuk memprioritaskan alternatif tersebut digunakan metode AHP. Metode AHP menghasilkan suatu strategi yang terbaik dari berbagai alternatif strategi yang direkomendasikan melalui matriks SWOT (Dewi *et al.* 2012).

Tabel 2. Matriks analisis SWOT

	Internal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Eksternal			
Peluang (Opportunities)		Strategi SO (Aggressive Strategies)	Strategi WO (Turn Around Strategies)
Ancaman (Threats)		Strategi ST (Diversification Strategies)	Strategi WT (Defensive Strategies)

Sumber: David (2011)

Metode Analisis QSPM

Tahap terakhir dalam proses perumusan strategi adalah pengambilan keputusan. Analisis yang digunakan pada tahap ini adalah *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Analisis QSPM bertujuan untuk memilih strategi terbaik dan paling cocok dengan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Pulau Morotai. Teknik analisis ini membantu memilih strategi yang paling baik untuk dipilih berdasarkan beberapa alternatif strategi yang telah dibuat pada tahap pencocokan sebelumnya.

Strategi yang dipilih berasal dari hasil analisis SWOT. Langkah pembuatan matriks QSPM yaitu pertama dengan pengisian kolom pertama matriks dengan daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang merupakan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihasilkan dari matriks EFE dan IFE pada tahap input. Bagian atas berisi alternatif strategi yang direkomendasikan, hasil dari matriks SWOT. Kolom kedua diisi dengan bobot tiap faktor sesuai matriks IFE dan EFE yang diperoleh masing-masing faktor dalam tahap input sebelumnya. Komponen utama dari analisis QSPM terdiri dari: faktor kunci berupa eksternal (peluang dan ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan), nilai pembobotan, *Attractiveness Score* (AS), *Total Attractiveness Score* (TAS) dan *Sum Total Attractiveness Score* (STAS). Skor daya tarik dikalikan dengan bobot untuk memperoleh *Total Attractiveness Score* (TAS). Nilai TAS tiap strategi dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah keseluruhan daya tarik total (*Sum Total Attractiveness Score*). Skor yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik (David 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Industri Perikanan di Kepulauan Morotai

Pembangunan industri perikanan dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa tujuan SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Sementara itu, lokasi pembangunan SKPT juga telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri (Kepmen) No 51 tahun 2016. Fokus pengembangan SKPT ada 4 hal, yaitu: peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing, modernisasi dan korporatisasi usaha, dan penguatan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan (KKP 2017).

Pengembangan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai akan melibatkan banyak pelaku usaha untuk membangun industri perikanan (Adam 2012). Relasi antara sektor industri, pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar), institusi formal serta informal.

Para aktor akan memilih hubungan sosial yang berdampak terhadap perkembangan usahanya (Due *et al.* 1999). Pemecahan masalah dalam membangun industrialisasi perikanan di Morotai tidak hanya dalam pemanfaatan sumberdaya material, namun perlu memperhatikan aspek sumberdaya sosial atau modal sosial, yang diharapkan mampu menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Bagi masyarakat pesisir, industrialisasi memberikan harapan untuk dapat memanfaatkan peluang ekonomi lain terhadap keberadaan industri perikanan.

Namun, hasil penelaahan dokumen-dokumen dan temuan di lapangan, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan SKPT di Morotai, yaitu: tata niaga yang belum teridentifikasi, investasi, *destructive fishing* dan IUU, konflik akses pemanfaatan SDKP antar nelayan, rendahnya pengetahuan, belum ada penetapan kawasan konservasi perairan (KKP), belum optimalnya pengembangan pariwisata bahari, mata pencaharian utama masyarakat lokal lebih berorientasi pertanian, usaha perikanan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan (konsumsi), usaha perikanan didominasi nelayan andon (Bitung), terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait diversifikasi hasil pengolahan ikan, masih lemahnya sumberdaya nelayan dalam pengelolaan kapal diatas 5 GT (DJPRL 2016; DPRL 2017; Pemkab. Pulau Morotai 2015).

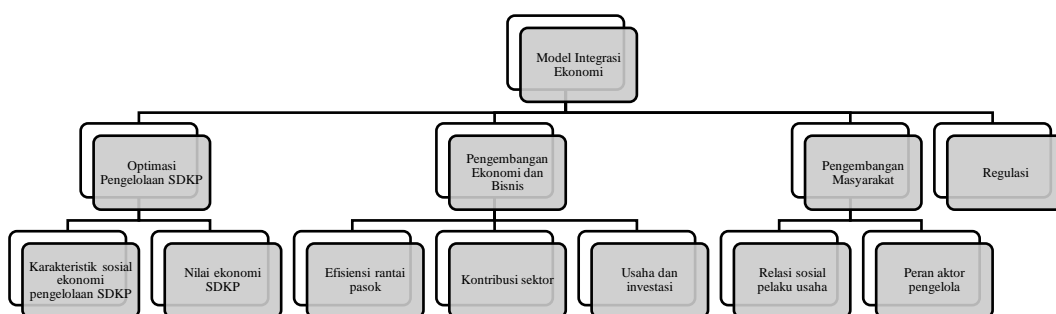
Berdasarkan pengamatan dan inventarisasi kondisi dan potensi Kabupaten Pulau Morotai maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi kelemahan adalah teknologi penangkapan ikan, fasilitas transportasi pemasaran ikan, fasilitas pabrik es, fasilitas *cold storage*, dan manajemen pengelolaan pendaratan ikan. Kelemahan-kelemahan tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan internal di Kabupaten Pulau Morotai. Infrastruktur selalu menjadi titik lemah dalam pembangunan daerah terluar (Maryaningsih *et.al.*, 2014).

Selanjutnya hasil identifikasi faktor yang menjadi ancaman dalam pengembangan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai adalah kebijakan, konflik, pengembangan sarana prasarana, investor asing dan persaingan antar daerah. Kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan (Dye 1992). Ancaman-ancaman lebih disebabkan oleh pengaruh dari pihak luar juga mampu menghambat pengembangan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai.

Konsep model pengembangan industri perikanan

Model konseptual yang dibangun merupakan suatu diagram dari satu set hubungan antara bidang-bidang yang diyakini memberi dampak dari pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, konsep model integrasi ekonomi dalam rangka mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai dirumuskan melalui 4 (empat) aspek yaitu: 1) aspek manajemen Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang mencakup optimasi pengelolaan SDKP serta perhitungan valuasi ekonomi terhadap keberlanjutan SDKP; 2) aspek pengembangan ekonomi dan bisnis, yang mencakup efisiensi rantai pasok, kontribusi sektor, dan kebutuhan pembiayaan usaha atau investasi; 3) aspek pengembangan masyarakat yang mencakup relasi sosial pelaku usaha dan peran aktor pengelola; dan 4) aspek regulasi program pengembangan SKPT di Kabupaten Pulau Morotai. Model konseptual integrasi

ekonomi dalam mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Gambar 5.

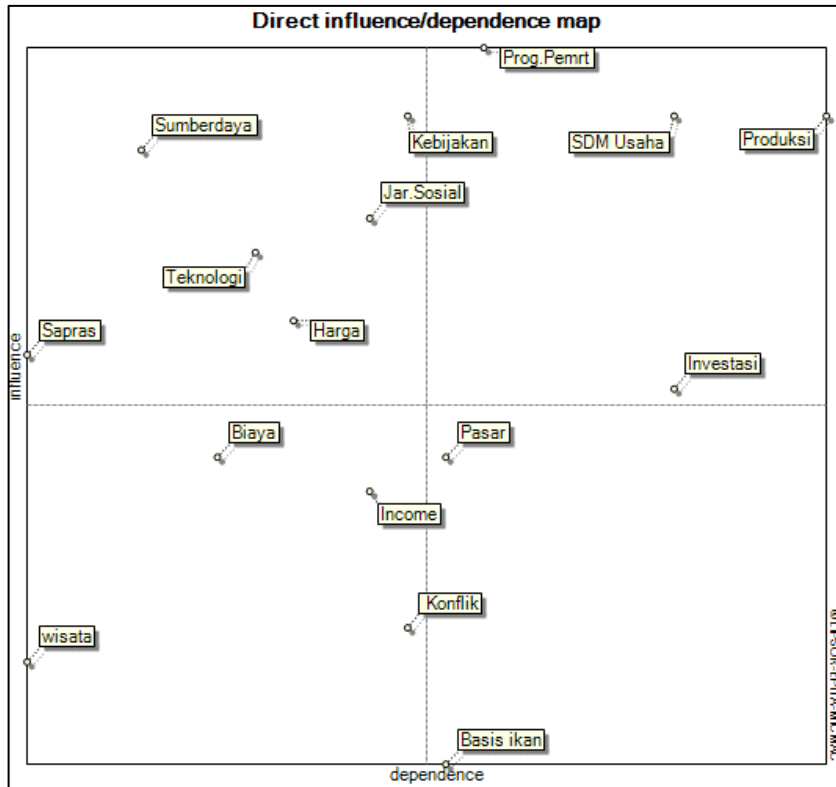


Gambar 5 Model konseptual integrasi ekonomi dalam mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai

Untuk menentukan tujuan pengembangan SKPT dalam mendukung industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan identifikasi variabel kunci yang berpengaruh dan memiliki ketergantungan melalui analisis MICMAC. Dalam analisis MICMAC ini, variabel kunci yang teridentifikasi dikategorikan pada beberapa kuadran, yaitu : 1) variabel perubahan (*relay variables*); 2) variabel yang berpengaruh (*influent variables*), 3) variabel yang dipengaruhi (*depending variables*), dan 4) variabel yang bebas (*autonomous variables*). Peta variabel kunci yang diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan ketergantungannya disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6 menunjukkan kondisi dari keragaman pengaruh dan ketergantungan variabel terhadap percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai. Terkait dengan pengaruh dan ketergantungan yang tinggi dari variabel, dapat diidentifikasi adalah program pemerintah, SDM usaha, investasi dan produksi.

Identifikasi aktor yang terlibat dalam kegiatan pengembangan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan dengan analisis MACTOR. Analisis ini dimaksudkan untuk membuat peta pelaku berdasarkan pengaruh dan ketergantungannya sebagai salah satu komponen utama dalam model integrasi ekonomi dalam mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai. Dalam analisis MACTOR ini, pemangku kepentingan yang teridentifikasi dikategorikan pada beberapa kuadran, yaitu: 1) aktor perubahan (*relay actor*); 2) aktor yang berpengaruh (*influent actor*), 3) aktor yang dipengaruhi (*depending actor*), dan 4) aktor yang bebas (*autonomous actor*). Peta pemangku kepentingan yang diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan ketergantungannya disajikan pada Gambar 7.

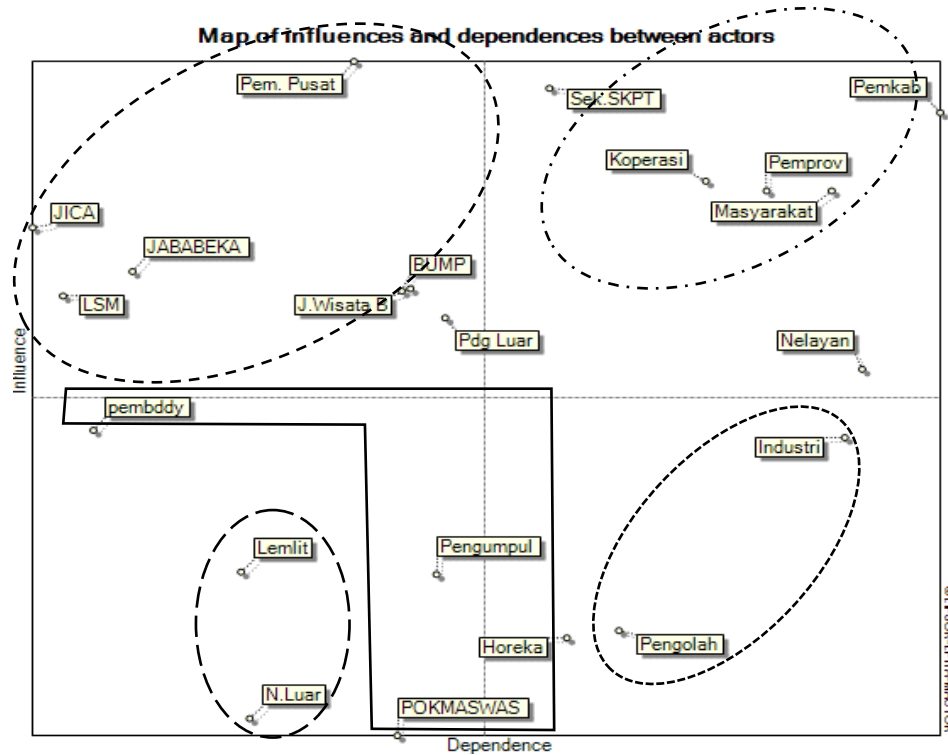


Gambar 6. Variabel kunci yang diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan ketergantungannya

Gambar 7 menunjukkan kondisi dari keragaman pengaruh dan ketergantungan pemangku kepentingan terhadap industrialisasi perikanan di Morotai sesuai dengan cakupan wilayah, tupoksi dan tujuan pengelolaannya. Terkait dengan kepentingan pengelolaan sumberdaya, tujuan keberadaan dan aktivitas dari stakeholder secara umum tercermin pada tugas dan fungsi utama dari masing-masing stakeholder tersebut.

Strategi integrasi ekonomi

Strategi prioritas yang mempertimbangkan 3 faktor internal utama (investasi usaha, pasar produk perikanan, jaringan sosial) dan 3 faktor eksternal utama (dukungan kebijakan lokasi SKPT, optimalisasi peran koperasi, lokasi strategis) dihasilkan 9 (sembilan) strategi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung integrasi ekonomi dalam mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai. Strategi yang dimaksud adalah: 1) Kemudahan investasi usaha; 2) Kebijakan konektivitas pasar produk perikanan; 3) Kebijakan kelembagaan pengelola SKPT; 4) Optimasi koperasi sebagai sumber pembiayaan usaha nelayan; 5) Koperasi sebagai simpul produksi dan pemasaran produk perikanan; 6) Peningkatan partisipasi dan representasi keanggotaan koperasi; 7) Harmonisasi regulasi RTRW dengan RZWP3K untuk mengakselerasi pengembangan investasi; 8) Segmentasi Morotai sebagai basis produksi dan ekspor fresh tuna; dan 9) Memperkuat konektivitas antar pelaku usaha perdagangan tuna di WPP 715, 716, 717. Matriks S-O yang disusun disajikan pada Tabel 3.



Keterangan:

- - - : Kelompok variabel input, yaitu kelompok yang mempunyai pengaruh besar tetapi sulit diintervensi.
- . - : Kelompok variabel intermediate, yaitu kelompok yang mempunyai pengaruh besar, tetapi dapat diintervensi.
- : *Resultant variable*, yaitu kelompok yang tidak mempunyai pengaruh tetapi tergantung pada input produksi.
- - - : *Excluded variable*, yaitu kelompok yang tidak berpengaruh dan tidak tergantung dengan yang lain.
- — : *Clustered variable*, yaitu kelompok yang cenderung berkumpul tetapi tidak cukup pengaruh

Gambar 7. Pemangku kepentingan yang diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan ketergantungannya

Dari strategi-strategi alternatif yang ada, strategi yang kedelapan yaitu segmentasi Morotai sebagai basis produksi dan ekspor tuna segar menjadi pilihan utama. Pilihan utama strategi adalah untuk pengembangan model integrasi ekonomi dalam mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan hasil analisis QSPM yang disajikan pada Tabel 4.

Model integrasi ekonomi untuk mempercepat industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai dapat menunjukkan hubungan langsung dan tidak langsung antar aktor dan variabel pembentuk model. Eksisting peran antar stakeholder telah terpetakan dan sehingga tergambar kelompok-kelompok stakeholder yang independen dan dependen untuk program integrasi ekonomi. Mengacu pada analisis SWOT dan dilanjutkan dengan analisis QSPM, maka dapat disusun strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang memiliki nilai efisien yang lebih baik. Diperkuat dengan hasil analisis kelayakan

investasi dan usaha bahwa penggunaan semua armada perikanan baik perahu tanpa motor (PTM) maupun kapal motor untuk berbagai ukuran masih layak untuk dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya prioritas strategi yang akan dilaksanakan untuk pengembangan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai adalah “Segmentasi Morotai sebagai Basis Produksi dan Ekspor *Fresh Tuna* (Tuna Segar)”. Oleh karena itu, model yang direkomendasikan adalah Model Implementatif Segmentasi Morotai sebagai Basis Produksi dan Ekspor tuna segar (*Fresh Tuna*).

Tabel 3. Matriks S-O model integrasi ekonomi yang mendukung percepatan industrialisasi perikanan di Kabupaten Pulau Morotai

			Faktor Internal (Kekuatan/<i>Strengths</i>)		
			S1	S2	S3
			Investasi Usaha	Pasar Produk Perikanan	Jaringan Sosial
Faktor Eksternal (Peluang /<i>Opportunities</i>)	O1	Dukungan kebijakan lokasi SKPT	Kemudahan investasi usaha	Kebijakan konektivitas pasar produk perikanan	Kebijakan kelembagaan pengelola SKPT
	O2	Optimalisasi peran koperasi	Optimasi koperasi sebagai sumber pembiayaan usaha nelayan	Koperasi sebagai simpul produksi dan pemasaran produk perikanan	Peningkatan partisipasi dan representasi keanggotaan koperasi
	O3	Lokasi strategis (berbatasan dengan wilayah luar)	Harmonisasi regulasi RTRW dengan RZWP3K untuk mengakselerasi pengembangan investasi	Segmentasi Morotai sebagai basis produksi dan ekspor fresh tuna	Memperkuat konektivitas antar pelaku usaha perdagangan tuna di WPP 715, 716, 717

Sumber: data primer diolah

Konsep integrasi ini memanfaatkan Kabupaten Pulau Morotai berada di lokasi yang strategis di titik pertemuan antara 3 WPP (WPP 715, WPP 716 dan WPP 717). Apabila potensi sumberdaya perikanan dapat dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin Kabupaten Pulau Morotai menjadi pusat produksi ikan tuna segar sehingga dapat dijadikan pusat pasar ikan tuna segar di wilayah timur Indonesia (Gambar 8).

Model digambarkan bahwa dalam model implementatif pengembangan Kabupaten Pulau Morotai sebagai basis produksi tuna segar terdapat strategi, aktor dan indikator keberhasilannya. Strategi yang diambil mengacu pada analisis MIC-MAC adalah optimalisasi program pemerintah, penguatan kapasitas SDM usaha dan peningkatan investasi usaha. Aktor yang terlibat dan berperan penting sebagaimana hasil analisis MACTOR diantaranya pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten, koperasi, nelayan, dan sekretariat SKPT. Dampak dari

pelaksanaan program-program ini adalah peningkatan produksi tuna segar dalam skala besar.

Tabel 4. Hasil perhitungan analisis QSPM

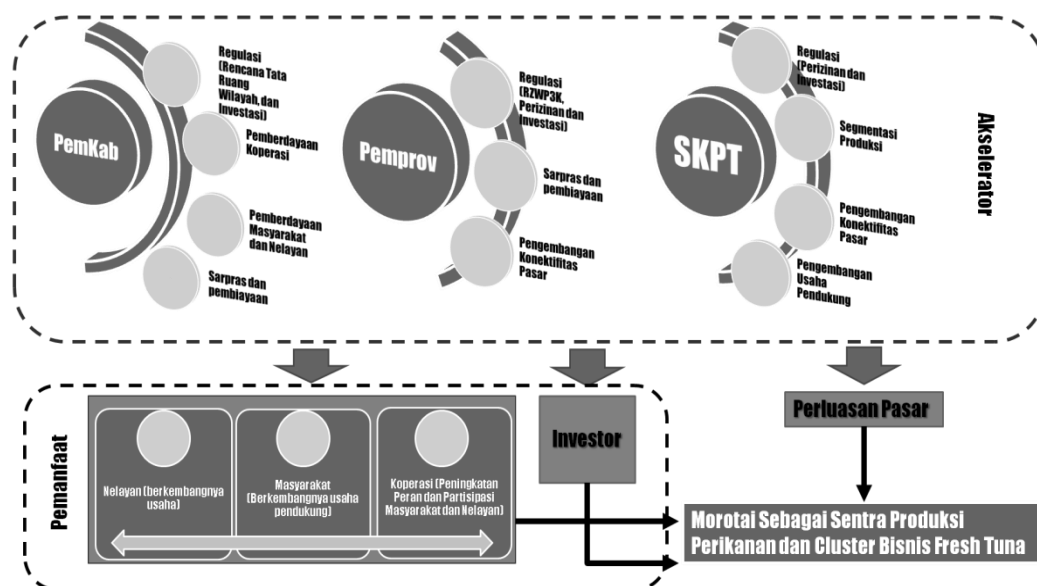
No	Strategi	Skoring (TAS)	Rangking
1	Kemudahan investasi usaha	2,54	2
2	Kebijakan konektivitas pasar produk perikanan	2,33	5
3	Kebijakan kelembagaan pengelola SKPT	1,88	9
4	Optimasi koperasi sebagai sumber pembiayaan usaha nelayan	2,21	7
5	Koperasi sebagai simpul produksi dan pemasaran produk perikanan	2,50	3
6	Peningkatan partisipasi dan representasi keanggotaan koperasi	2,29	6
7	Harmonisasi regulasi RTRW dengan RZWP3K untuk mengakselerasi pengembangan investasi	2,17	8
8	Segmentasi Morotai sebagai basis produksi dan ekspor tuna segar	2,63	1
9	Memperkuat konektivitas antar pelaku usaha perdagangan tuna di WPP 715, 716, 717	2,42	4

Model ini dikembangkan dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya, optimalisasi jaringan sosial dan sistim bisnis yang efektif sehingga tercapai perbaikan kesejahteraan pelaku utama perikanan tanpa menimbulkan destruksi terhadap komponen dan potensi kawasan. Pengembangan analisis untuk mengestimasi nilai pemanfaatan sumberdaya melalui valuasi ekonomi, yang dipadu dengan analisis jaringan sosial, analisis rantai pasok, analisis kelayakan investasi dan analisis kontribusi PDRB diyakini dapat mewujudkan maksud tersebut. Secara operasional, model ini diharapkan dapat membantu merancang pola pengelolaan kawasan yang menjamin efektifitas pelaksanaan kebijakan perikanan, mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan, menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, memberi arah interaksi harmonis kelembagaan, dan lainnya.

Arahan strategi dapat dikembangkan secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai dengan SKPT menjadi pusat produksi tuna segarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, semua pihak yaitu pemerintah daerah dan Sekretariat SKPT beserta pemangku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung harus bersama-sama dan serius mewujudkan arahan yang direkomendasikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Aktor-aktor yang berperan antara lain:

a. Pemerintah Propinsi

Pemerintah propinsi dapat mendorong Kabupaten Pulau Morotai sebagai sentra produksi dan pemasaran tuna segar. Pemerintah merancang program yang dapat meningkatkan produktivitas usaha dan keterlibatan seluruh sumberdaya potensial melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan pembangunan.



Gambar 8. Model implementatif segmentasi morotai sebagai basis produksi dan ekspor tuna segar

b. Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program SKPT. Saat ini Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan beberapa hal terkait SKPT, diantaranya: sebesar 90% dinas menuntaskan pembebasan lahan MIAMARI 90 ha, cold storage 10 hektar, dan lahan 2 hektar. Kemudian dukungan pemda terhadap pengembangan SKPT sudah maksimal sesuai dengan arahan Bupati.

c. Sekretariat SKPT

Sekretariat SKPT bertanggung jawab untuk mensukseskan program SKPT di tingkat kabupaten. Karena Sekretariat SKPT memiliki fungsi sebagai kepanjangan tangan, mata, telinga dan penyambung lidah kepentingan pusat di daerah dan sebaliknya. Meskipun saat ini, Sekretariat SKPT tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dan menjalankan fungsi pengawasan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Hal ini karena SKPT merupakan program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat program industrialisasi di dalam sektor perikanan. Tusi para pengurus SKPT lebih pada melaksanakan arahan dari KKP.

d. Koperasi

Koperasi sebagai bentuk kerjasama masyarakat perikanan dalam hal ini nelayan. Selain itu koperasi juga dapat berperan sebagai mitra SKPT dan nelayan dalam menyediakan input dan menampung hasil produksi. Hal ini harus didukung oleh regulasi yang kondusif untuk koperasi.

e. Nelayan

Nelayan merupakan aktor utama dalam melakukan usaha penangkapan, sebagai penyedia komoditas tuna yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor. Oleh karena itu nelayan harus dilibatkan dalam kegiatan pengembangan SKPT, sehingga nelayan dapat menjalankan perannya dengan baik.

f. Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai ikut berpartisipasi secara aktif baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan sektor perikanan. Masyarakat dapat ditingkatkan pengetahuannya dengan memanfaatkan kemudahan penguasaan teknologi.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) telah berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Sinergitas pemerintah pusat dan daerah juga menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk industri perikanan. Regulasi yang sudah ada dapat menjadi acuan dalam menciptakan aktivitas yang sehat bagi pengembangan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, serta tumbuhnya industri pada kawasan SKPT.

Model industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai ditentukan 4 (empat) aspek pokok, meliputi yaitu: (1) aspek manajemen Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang mencakup optimasi pengelolaan SDKP serta perhitungan valuasi ekonomi terhadap keberlanjutan SDKP; (2) aspek pengembangan ekonomi dan bisnis, yang mencakup efisiensi rantai pasok, kontribusi sektor, dan kebutuhan pembiayaan usaha atau investasi; (3) aspek pengembangan masyarakat yang mencakup relasi sosial pelaku usaha dan peran aktor pengelola; dan (4) aspek regulasi program pengembangan SKPT di Kabupaten Pulau Morotai.

Strategi integrasi ekonomi difokuskan pada implementasi model industri perikanan sebagai basis produksi dan ekspor Ikan Tuna segar. Implementasinya adalah sinergitas dan komitmen pimpinan daerah untuk melaksanakan program secara berkelanjutan sehingga tujuan tercapai. Program yang dilaksanakan meskipun bersifat sektoral namun memerlukan sinergitas dan koordinasi antar stakeholder terkait. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi sumberdaya ikan tuna yang berada di wilayah Morotai sehingga menjadi sumber pendapatan daerah. Sementara itu, optimalisasi SKPT dapat difokuskan sebagai pusat produksi dan pemasaran tuna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam L. 2012. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. 2(2):115-126.
- Azwar S. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [BBRSEKP] Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2017. *Model Integrasi Ekonomi dalam Mendukung Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional di Kabupaten Pulau Morotai*. BBRSEKP. Jakarta. Tidak dipublikasikan. 442 hlm.
- [BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 2015. *Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai*. Kabupaten Pulau Morotai: Bappeda Kabupaten Pulau Morotai. 174 hlm.

- David FR. 2011. *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi IS, Daryanto A, Fahmi I. 2012. Aplikasi Metode AHP-SWOT untuk Perencanaan Strategi Lembaga Non Profit. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 11(2):113-120.
- [DJPR] Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 2016. *Masterplan dan Bisnis Plan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- [DPRL] Direktorat Perencanaan Ruang Laut. 2017. *Masterplan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)-Kabupaten Pulau Morotai*. Jakarta: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Due P, Holstein B, Lund R, Modvig J, Avlund K. 1999. Social Relation: network, support and Relational Strain. *Social Science & Medicine*. (48):661-673.
- Dye TR. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Eriyatno. 1999. *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen*. Bogor: IPB Press.
- Hubeis M. 1991. *Mic-Mac: Analisis Peramal Parameter Sistem*. Bogor: Pusat Antar Universitas IPB.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. *Grand Desain Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu*. Jakarta: Biro Perencanaan KKP Republik Indonesia.
- Maryaningsih N, Hermansyah O, Savitri M. 2014. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. 17(1):62-98.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.
- Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. 2015. *Buku Statistik Perikanan Tangkap*. Kabupaten Pulau Morotai: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.
- Rangkuti F. 1997. *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saaty TL. 1991. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.